



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG INSPEKTORAT

Jl. Sorong Klamono Km24 Airmas Kabupaten Sorong

Email : itkabsorong@gmail.com



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

2025



KATA PENGANTAR


Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disadari adanya risiko yang dapat menghalangi pencapaian tersebut secara ekonomis, efisien dan efektif, sehingga diperlukan pengendalian internal secara memadai. Salah satu bentuk pengendalian internal tersebut adalah adanya pengawasan internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.

Dalam menyelenggaraan pengawasan internal sebagai bagian dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, kepegawaian, dan persandian, Inspektorat juga memiliki risiko dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Inspektorat menyusun Perencanaan Strategis masa transisi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Sorong untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang juga diharuskan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Inspektorat 2023-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Tahun 2025 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif selama satu tahun ke depan yang diharapkan dapat memeberikan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Sorong dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya bidang pengawasan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2025 ini berfungsi sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong tahun 2025.

Dengan segenap perhatian, kerjasama serta saran untuk perbaikan yang membangun demi kemajuan bangsa, semoga kami mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Sorong.

Aimas, 30 Januari 2025
Inspektur Kabupaten Sorong



Dr. Ari Wijayanti, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199603 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II.....	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN.....	8
INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN SEBELUMNYA.....	8
1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG.....	8
1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG.....	11
1.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG.....	14
1.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	14
BAB III.....	15
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG.....	15
BAB V.....	29
PENUTUP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD merupakan hal yang sangat penting didalam menunjang proses pembangunan daerah. Penyusunan Renja PD Inspektorat Kabupaten Sorong menjadi langkah operasionalisasi dalam rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahunan (RENJA) merupakan acuan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana Kerja Tahunan yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun melalui proses Rapat koordinasi terbatas dengan semua pejabat structural, pengendali teknis, ketua tim sebagai perwakilan dari auditor dan analis.

Sesuai dengan tuntutan regulasi dalam upaya pencapaian hasil yang optimal, maka penyusunan Renja 2025 Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sorong secara hierarki berpedoman pada (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sorong pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 disusun berdasar tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu Indonesia Emas 2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2025 dijabarkan dalam 17 Program Prioritas, yakni PN 1: Mencapai swasembada pangan, energi dan air, PN 2: Penyempurnaan sistem penerimaan negara, PN 3: Reformasi politik, hukum dan birokrasi, PN 4: Pencegahan dan pemberantas korupsi, PN 5: Pemberantasan kemiskinan, PN 6: Pencegahan dan pemberantasan narkoba, PN 7: Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, PN 8: Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, PN 9: Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, PN 10: Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan, anak serta

penyandang disabilitas, PN 11: Menjamin pelestarian lingkungan hidup, PN 12: Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung kepetani, PN 13: Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan, PN 14: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibukota Nusantara serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya, PN 15: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, PN 16: Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah, PN 17: Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Rencana Kerja Tahunan tahunan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan tersebut disajikan dengan sistematika :

- a) Pendahuluan
- b) Hasil Evaluasi Renja tahun lalu;
- c) Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d) Program dan Kegiatan.
- e) Penutup.

Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2025 merupakan :

1. Pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Inspektorat Kabupaten Sorong , yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

9. Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2025, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

1) Maksud

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern Pemerintah oleh Inspektorat.
- b) Menjabarkan tugas pokok dan fungsi PD kedalam rencana program prioritas kegiatan tahunan.
- c) Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran dalam Renstra PD dan RPD Kabupaten Sorong di tahun 2025.
- d) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan daerah.

2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana kerja Inspektorat 2025 adalah untuk :

- a) Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b) Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

- c) Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan dalam menentukan program dan kegiatan PD Tahun 2025.
- d) Tersedianya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
- e) Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA Inspektorat Kabupaten Sorong tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong
- 2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN
SORONG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten
Sorong

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN SEBELUMNYA

1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan –

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Dan Realisasi Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana 2023	Realisasi 2023 s/d Triwulan I	Realisasi 2023 s/d Triwulan II	Realisasi 2023 s/d Triwulan III	Realisasi 2023 s/d Triwulan IV	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Eva SAKIP, LPPD	10	3	5	1	1	10	100.00%
2	Pengawasan Desa	Eva Dana Desa/ Kelurahan	20	2	6	8	4	20	100.00%
3	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Lap Keuangan OPD/ Pemda	20	2	4	10	8	24	120.00%
4	Reviu Laporan Kinerja	Audit Kinerja/ Reviu	10	1	2	4	3	10	100.00%
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Keuangan OPD	10	2	3	2	2	9	90.00%
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit	20	5	6	5	3	19	95.00%
		Pemeriksaan Khusus Ringan	4	1	1	1		3	75.00%
		Pemeriksaan Khusus Berat	4	1	2	2		5	125.00%
		Audit PBJ/ Monev	140	5	15	35	106	161	115.00%
7	Kerjasama Pengawasan Internal	SABER-PUNGLI	1		1			1	100.00%
		Survei Penilaian Integritas (SPI - KPK)	1			1		1	100.00%
8	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal/ Internal APIP	6	1	1	2	2	6	100.00%
9	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	TP-TGR daerah	2					0	0.00%
10	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	E-LKHPN, E-LKHASN	1		1			1	100.00%
		Zona Integritas	1					0	0.00%

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana 2023	Realisasi 2023 s/d Triwulan I	Realisasi 2023 s/d Triwulan II	Realisasi 2023 s/d Triwulan III	Realisasi 2023 s/d Triwulan IV	Realisasi 2023	Capaian (%)
11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring Centre of Prevention (MCP- KPK)	1				1	1	100.00%
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1			1		1	100.00%
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1					0	0.00%
13	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan OPD	6	1		1		2	33.33%
		Urusan PEMDA	6	1	1	1		3	50.00%
14	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Digitalisasi Dokumen	1				1	1	100.00%
		Media Informasi Publik	1				1	1	100.00%
		Tim Penilai JFA	1				1	1	100.00%
		Tim Penilai PUPD	1				1	1	100.00%
15	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Diklat Substantif	70		12	34	10	56	80.00%
		Diklat Non Substantif	8			5		5	62.50%
		Diklat Penjenjangan	6		2		1	3	50.00%
		Ujian Penjenjangan	6		2		1	3	50.00%
	Jumlah		359					348	96.94%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT INSPEKTORAT Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 untuk kegiatan rata-rata capaian kinerja mencapai target dengan capaian 96,94% dengan kategori **BAIK**.

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator kinerja program telah selaras dengan program/kegiatan pada RPD Kabupaten Sorong, sehingga di tahun 2024 yang merupakan tahun ke-kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Sesuai dengan dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Maturitas SPIP	3
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	80%
		Persentase penanganan kasus pengaduan	50%
		Level Kapabilitas APIP	3
		Survei Penilaian Integritas	58
	2. Meningkatkan kualitas layanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	72
		Nilai AKIP	71

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun ... (thn n-1)	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)	Ya	Ya	Level 3 DC (Dengan Catatan)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	Ya	Ya		70%	70%	80%	80%	82%	74%		70%	80%
3	Persentase penanganan kasus pengaduan	Ya	Ya		40%	45%	50%	55%	38%	34%		45%	50%
4	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)	Ya	Ya	Level 3 DC (Dengan Catatan)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3
5	Suvei Penilaian Integritas	Ya	Ya		55	57	59	62	60			57	59
6	Nilai Survey Kepuasan	Ya				65	70	75		78.39			
7	Nilai SAKIP	Ya			61.99	62.00	70.00	62.25	62.50	63.40		62.25	63.00

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, sehingga menjadi lebih spesifik dan fungsi yang lebih luas, diisi oleh staf profesional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Sorong yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Sorong dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari seluruh perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sudah terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal dan memadai.

b. Faktor Penghambat :

- Program Prioritas Daerah melalui Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang belum menyesuaikan pada Prioritas Pembangunan Nasional Dan Kebijakan Pemerintah Pusat.
- Kegiatan mandatory/ kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan Pengawasan yang telah dipetakan pada program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

1.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sorong tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance;
- b. Pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada organisasi perangkat daerah yang belum memadai;
- c. Profesionalisme APIP dan membangun sistem pencegahan korupsi serta menjadi pioneer kepada masing-masing organisasi perangkat daerah pada wilayah pengawasannya;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan berbantuan sistem E-Government.
- e. Komitmen, kolaborasi, dan penguatan kerjasama serta sinergi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Sorong. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari
Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TIDAK ADA USULAN				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

3.1 Tujuan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong, maka berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Sorong Tahun 2025 disusun berdasarkan hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2025 yaitu : Tema pembangunan yang dikemukakan dalam RPJMN Tahun 2021-2026 adalah : “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dengan agenda utama pembangunannya. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- 3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkua melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Sorong maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-5 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Sorong dengan RPD

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 , yaitu :

a. Tujuan

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima”

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2024 terhadap RPD 2023-2026 maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Sorong sebagai

“Quality Assurance dan Consulting “

bagi Kabupaten Sorong terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Sorong.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk

menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kerja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Unsur Pengawasan										
Urusan Pemerintahan										
Inspektorat Daerah						13,389,731,163			15,855,764,882	
6 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,100,323,163			6,531,363,623	
6 0 0 1 1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
6 0 0 1 1	2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kab Sorong	5	Laporan	-			-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6 0 0 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Inspektorat Kab Sorong	40	org	3,063,735,488.00	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40	3,370,109,036.80
6 0 0 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab Sorong	80	setel	49,700,000	DBH		160	70,000,000.00
6 0 0 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	%	13,710,000.00	DBH		100	14,727,470.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kab Sorong	100	%	36,835,000.00	DBH		100	37,873,596.15
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	%	83,459,900.00	DBH		100	90,692,525.00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kab Sorong	100	%	21,700,000.00	DBH		100	29,498,500.00
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Inspektorat Kab Sorong	100	Tamu	366,478,900.00	DBH		48	393,373,280.00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab Sorong	60	Org	1,221,330,000.00	DBH		80	1,117,628,600.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6 0 0 1 1	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kab Sorong	5	Unit	95,916,635	DBH	5	461,956,701.00
6 0 0 1 1	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab Sorong	100	%	5,000,000.00	DBH	100	6,292,000.00
-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab Sorong	12	bulan	145,684,000.00	DBH	12	107,053,540.00
-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab Sorong	6	org	126,000,000.00	SILPA	-	198,924,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6 0 0 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kab Sorong	17	kendaraan	371,880,000.00	DBH		17	381,974,300.00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kab Sorong	12	kendaraan	65,424,000.00	DBH		12	67,865,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam kondisi prima	Inspektorat Kab Sorong	57	unit	49,560,000.00	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		57	59,197,300.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Kab Sorong	800	m2	383,909,240.00	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		800	124,197,773.60
									-	-
6 0 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL					4,506,622,000			-	4,725,067,208
6 0 0 1 2	2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab Sorong	15	laporan	334,950,000.00	DBH		15	330,840,000.00
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab Sorong	15	laporan	430,650,000.00	DBH		15	330,840,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kab Sorong	15	laporan	309,750,000.00	DBH		15	330,840,000.00
	Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya Pengawasan Desa	Inspektorat Kab Sorong	30	laporan	575,250,000.00	DBH		30	621,360,000.00
	Pengawasan Desa	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Kab Sorong	90	laporan	656,500,000.00	DBH		90	720,864,000.00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kab Sorong	1	kegiatan	326,504,000.00	DBH		1	234,598,200.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kab Sorong	6	laporan	240,598,000.00	DBH		6	398,659,968.00
6 0 0 2.02 1 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			174,785,040.00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probit Audit yang dapat diselesaikan	Inspektorat Kab Sorong	48	kegiatan	1,582,420,000.00	DBH		48	1,582,280,000.00
	-	Jumlah Pemeriksaan Khusus	Inspektorat Kab Sorong	12	Laporan				12	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	-	Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	Inspektorat Kab Sorong	160	Laporan			240	-	
								-	-	
6 0 0 KEBIJAKAN, 1 3 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2,782,786,000		-	4,599,334,052	
6 0 0 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Pengawasan Berbasis Risiko	Inspektorat Kab Sorong	8	kegiatan	202,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8	299,140,560.00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab Sorong	88	kegiatan	1,485,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88	2,855,778,291.60	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6 0 0 1 3 2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	Inspektorat Kab Sorong	8	Laporan	194,890,000.00	DBH		8	276,170,000.00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	374,100,000.00	DBH		2	238,872,000.00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab Sorong	4	kegiatan	153,060,000.00	DBH		4	256,340,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Tahun 2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Asistensi dan Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	Inspektorat Kab Sorong	2	kegiatan	373,636,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)		2	673,033,200.00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahunan (Renja) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dan merupakan salah satu dokumen yang berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sorong Tahun 2025.

Renja ini disusun untuk menjadi arah dan pedoman bagi segenap upaya Inspektorat Kabupaten Sorong untuk 1 (satu) tahun, khususnya dalam menjawab tantangan dalam bidang pengawasan yang semakin kompleks, dan menjadi acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya Sasaran dan Tujuan Pemerintah Daerah serta Inspektorat Kabupaten Sorong dalam bidang pengawasan.

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORATKAB. SORONG
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Prioritas Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Inspektorat						13,389,731,163.00							15.537.500.000,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN						12,168,401,163.00							13.787.500.000,00	
6	01	INSPEKTORAT DAERAH						12,168,401,163.00							13.787.500.000,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4,878,993,163.00					-	5.502.500.000,00	
6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-					-	20.000.000,00	
6	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan		Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				20.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3,063,735,488.00					-	3.650.000.000,00	
6	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	3,063,735,488.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				3.650.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	49,700,000.00					-	75.000.000,00	
6	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			80 Paket	49,700,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				75.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	522,183,800.00					-	478.500.000,00	
6	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 Paket	13,710,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				9.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			20 Paket	36,835,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				32.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36 Paket	83,459,900.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				120.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			40 Paket	21,700,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				47.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 Laporan	366,478,900.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				270.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan	1,221,330,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				1.750.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	95,916,635.00					-	120.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	95,916,635.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	276,684,000.00			-	-	-		369.000.000,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100 Laporan	5,000,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		9.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	145,684,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		130.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	126,000,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		230.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	870,773,240.00			-	-	-		790.000.000,00	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya												
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18 Unit	371,880,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		575.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya												
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	65,424,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	49,560,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung												
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	383,909,240.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	-	4,506,622,000.00			-	-	-		5.080.000.000,00	
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	100laporan	-	2,874,202,000.00			-	-	-	110laporan	3.140.000.000,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah												
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan		15 Laporan	334,950,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	16 Laporan	360.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah												
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan		15 Laporan	430,650,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	16 Laporan	360.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja												
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan		15 Laporan	309,750,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	16 Laporan	360.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan												
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	26 Laporan		30 Laporan	575,250,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	26 Laporan	630.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	26 Laporan			90 Laporan	656,500,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	26 Laporan	790.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 02	2.01 0006	KERJA Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan			2 Kesepakatan	326,504,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	2 Kesepakatan	360.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 02	2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen			8 Dokumen	240,598,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 Dokumen	280.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	252laporan		-	1,632,420,000.00			-	-	-	252laporan	1.940.000.000,00	
6	01 02	2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan			4 Laporan	50,000,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	140.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 02	2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	252 Laporan			160 Laporan	1,582,420,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	252 Laporan	1.800.000.000,00	INSPEKTORAT
3	6 01 03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIYAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-		-	2,782,786,000.00						-	3.205.000.000,00	
6	01 03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	135kegiatan		-	1,687,100,000.00			-	-	-	135kegiatan	2.090.000.000,00	
6	01 03	2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	14 Rekomendasi			12 Rekomendasi	202,100,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14 Rekomendasi	240.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 03	2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	120 Rekomendasi			105 Rekomendasi	1,485,000,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	120 Rekomendasi	1.850.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	26Kegiatan		-	1,095,686,000.00			-	-	-	26Kegiatan	1.115.000.000,00	
6	01 03	2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah			32 perangkat daerah	194,890,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12 perangkat daerah	180.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 03	2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah			32 perangkat daerah	374,100,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	8 perangkat daerah	385.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 03	2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan			4 Kegiatan	153,060,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	6 Kegiatan	175.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01 03	2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah			32 perangkat daerah	373,636,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	8 perangkat daerah	375.000.000,00	INSPEKTORAT
X			NON URUSAN					1,221,330,000.00							1.750.000.000,00	
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					1,221,330,000.00							1.750.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																				Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
4	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1,221,330,000.00							1,750.000.000,00				
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	1,221,330,000.00			-	-	-	-	1.750.000.000,00				
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	1,221,330,000.00	Kab. Sorong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-	1.750.000.000,00	INSPEKTORAT			
J U M L A H																			13,389,731,163.00		15.537.500.000,00	

Laporan Keselerasan
INSPEKTORAT KAB. SORONG TAHUN 2025

NO	Tujuan OPD	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Ya/Tidak)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	Target	PRORAM				KEGIATAN				Sub KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)			KET			
							NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Target	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1.	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	Ya	1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)	Ya	Level 3	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Level 3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Level 3						4,506,622,000			
																	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	334,950,000		y	
																	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	430,650,000		y	
																	3	Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	309,750,000		y	
																	4	Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	24 Laporan	575,250,000		y	
																	5	Pengawasan Desa	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	20 Laporan	656,500,000		y	
																	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Laporan	326,504,000		y	

NO	Tujuan OPD	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Ya/Tidak)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	Target	NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Target	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target	TERKAIT	TIDAK TERKAIT	KET
				2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	Ya	80%										7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6 Laporan	240,598,000		y
																	8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	50,000,000.00		y
				3	Persentase penanganan kasus pengaduan	Ya	35%										9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Proby Audit yang dapat diselesaikan	20 Laporan	1,582,420,000.00		y
																			Jumlah Pemeriksaan Khusus	6 Laporan	-		y	
																			Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	140 Laporan			y	
			Ya	4	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)	Ya	level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan Fasilitasi Teknis	Fasilitasi Teknis Bidang Pengawasan dan Kebijakan Pengawasan	Level 3						2,782,786,000		
																	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Pengawasan Berbasis Risiko	8 Laporan	202,100,000		y
																	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	90 Kegiatan	1,485,000,000		y
													Pendampingan dan Asistensi	Penyelenggaraan dan Asistensi bidang Pengawasan	Terwujudnya pendampingan dan asistensi bidang pengawasan yang berkualitas	Ya	3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	6 kegiatan	194,890,000		y
																	4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	8 Laporan	374,100,000		y
																	5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	32 Laporan	153,060,000		y
																	6	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	4 Laporan	373,636,000		y
2		Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Ya	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Ya	65	1	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota / Kabupaten	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%										6,100,323,163		
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ya	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN	41 Orang	3,063,735,488		y
													Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ya	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41 Orang	49,700,000		y

